



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA HENY WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 446232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 487.260.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/47 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 128 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/200 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 292.032.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/56 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 150.228.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 105.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA BEBEK/MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 7.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	599.260.000
III. HUTANG	Rp.	110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	489.260.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.